



RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN 2022



**DINAS SOSIAL
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Tahun 2022 adalah merupakan dokumen perencanaan tahun ketiga dari Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2016 – 2021 yang memuat rencana tujuan dan sasaran periode tersebut yang hendak dicapai.

Program Kegiatan pada RENJA 2022 ini mengacu pada Program Kegiatan pada RENSTRA tahun ke-5 dengan tetap mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan pada tahun-tahun sebelumnya juga merumuskan program/kegiatan baru untuk mempersiapkan kesinambungannya pada tahun 2016-2021 untuk menyesuaikan dengan kondisi aktual dan permasalahan yang dihadapi.

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 berdasarkan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja OPD Tahun Lalu, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis, dan Indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu Indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan program dan kegiatan.

Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2022. Disamping itu juga untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana Kerja OPD tahun 2022 diharapkan dapat memberikan informasi tentang kejelasan dan manfaat program / kegiatan yang direncanakan bagi pemerintah dan masyarakat.

Benteng, 1 Juni 2021
Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Kepulauan Selayar



PATTA AMIR, SP
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip. 1964127 198711 1 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan.....	3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA OPD TAHUN 2020.....	5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Sosial	5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD.....	18
2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	20
2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	22
BAB III TUJUAN,SASARAN,PROGRAMDANKEGIATAN.....	31
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	31
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja OPD	32
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	34
BAB V PENUTUP	39

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD) merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan, Renja Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. RENJA OPD adalah dokumen yang secara substansial merupakan penjabaran dari visi, misi dan program OPD seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) OPD dan sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
2. RENJA OPD merupakan acuan bagi OPD untuk memasukkan program dan kegiatan ke dalam KUA-PPAS yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada tahun 2022;
3. RENJA OPD merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan OPD untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja OPD.

Mengingat arti strategis RENJA OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Daerah, maka sejak awal penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Dinas Sosial Tahun 2022 mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RENJA tahun sebelumnya dan mengacu pada RKPD tahun berjalan;
2. Program dan Kegiatan dalam RENJA harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 – 2026;
3. Program dan Kegiatan dalam Renja harus selaras dengan program dan kegiatan yang telah disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam Forum Musrenbang Daerah;
4. Program dan Kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Dinas Sosial Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
7. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Sulawesi Selatan tahun 2005 sampai dengan tahun 2025;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2005 – 2025;
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Renja Dinas Sosial Tahun 2022 dimaksudkan sebagai panduan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2021 dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2022.

1.3.2 Tujuan

Sedangkan tujuan disusunnya Renja Dinas Sosial Tahun 2022 ini adalah untuk menjadi acuan dalam Penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2022.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka sistematika penyusunan Renja Dinas Sosial Tahun 2022 meliputi :

BAB I PENDAHULUAN,

berisi tentang: Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA OPD TAHUN LALU,

berisi tentang : Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD, Analisis Kinerja Pelayanan OPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN,

Berisi tentang : Tujuan dan sasaran Rencana Kerja OPD, serta Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Berisi tentang Program, Kegiatan dan Sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 dan Perkiraan Pendanaan tahun 2023

BAB V PENUTUP

BAB. II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dari hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun 2020 disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan output program yaitu terwujudnya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran dengan alokasi anggaran Rp. 682.416.000,- dan terealisasi per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 654.429.486,- atau 95,99 % dari alokasi anggaran, adapun rincian kegiatan dari Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebagai berikut:

- a) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan output kegiatan tersedianya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan alokasi anggaran Rp.83.000.000,- dan terealisasi per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 74.473.322.00,- atau 92,22% dari alokasi anggaran.
- b) Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan output kegiatan tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan alokasi anggaran Rp. 10.000.000,- dan terealisasi per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 8.125.000,- atau 81,25 % dari alokasi anggaran.
- c) Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah dan Luar Daerah dengan output kegiatan terwujudnya laporan hasil rapat-rapat koordinasi dan konsultasi serta perjalanan dinas lainnya didalam daerah dan diluar daerah dengan alokasi anggaran Rp.250.922.000.00- dan terealisasi per 31 Desember

2020 sebesar Rp. 250.114.503.00,- atau 99,68 % dari alokasi anggaran.

- d) Kegiatan Pelaksanaan Penunjang Adminstrasi Perkantoran dengan output kegiatan terwujudnya pelayanan penunjang adminstrasi perkantoran dengan alokasi anggaran Rp. 451.053.302,00,- dan terealisasi per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 448.974.850,00,- atau 99,54 % dari alokasi anggaran.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan output program yaitu terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan alokasi anggaran Rp. 86.500.000,- dan terealisasi per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 81.201.904,- atau 93,86 % dari alokasi anggaran, adapun rincian kegiatan dari Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebagai berikut :

- a) Kegiatan pengadaan Perlengkapan Gedung kantor dengan out put kegiatan tersedianya peralatan gedung kantor dengan alokasi anggaran Rp. 48.600.000,00,- dan terealisasi per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 48.600.000,00,- atau 100 % dari alokasi anggaran.
- b) Kegiatan Pengadaan Peralatan gedung kantor dengan out put kegiatan terpeliharanya gedung gedung kantor dengan alokasi anggaran Rp.227,500.00.,- dan terealisasi per 31 Desmber 2020 sebesar Rp.197.500.000,00,- atau 86,81 % dari alokasi anggaran.
- c) Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dengan out put kegiatan terpeliharanya gedung gedung kantor dengan alokasi anggaran Rp.10.000.000,00,- dan terealisasi per 31

Desember 2020 sebesar Rp.10.000.000,00,- atau 100 % dari alokasi anggaran.

- d) Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional dengan output kegiatan terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dengan alokasi anggaran Rp.114.000.000,00 dan terealisasi per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 113.000.000,00,- atau 99,99 % dari alokasi anggaran.
- e) Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan Gedung Kantor dengan output kegiatan terpeliharanya peralatan gedung kantor dengan alokasi anggaran Rp.20.000.000,00,- dan terealisasi per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 19.968.000,00,- atau 99,84 % dari alokasi anggaran.
- f) Kegiatan Rehabilitasi Sekretariat LK3, SLRT, PKH, dan TKSK dengan alokasi anggaran Rp.5.880.000,00,- dan terealisasi per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 5.880.000,00,- atau 100 % dari alokasi anggaran.

3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan output program yaitu meningkatnya pengetahuan sumber daya aparatur dengan alokasi anggaran Rp. 22.025.000, dan terealisasi per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 21.750.800,- atau 98,76 % dari alokasi anggaran, adapun rincian kegiatan dari Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur sebagai berikut :

- a. Pendidikan dan Pelatihan Formal dengan output kegiatan Penambahan Pengetahuan ASN dengan alokasi anggaran Rp. 22.025.000,- dan terealisasi per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 21.750.800,- atau 98,76% dari alokasi anggaran.

4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan output program yaitu tersedianya pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan alokasi anggaran Rp. 130.620.078,- dan terealisasi per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 130.555.239,- atau 99,95 % dari alokasi anggaran, adapun rincian kegiatan dari Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan sebagai berikut :

- a) Kegiatan Penyusunan Standar Operasional Prosedur dengan output kegiatan terwujudnya penyusunan Standar Operasional Prosedur dengan alokasi anggaran 4.000.000,00,- dan terealisasi per 31 Desember 2020 sebesar Rp.4.000.000,00,- atau 100 % dari alokasi anggaran.
- b) Kegiatan Penatausahaan Keuangan dengan output kegiatan laporan RFK dan laporan Keuangan akhir tahun dengan alokasi anggaran 4.000.000,00,- dan terealisasi per 31 Desember 2020 sebesar Rp.4.000.000,00,- atau 100 % dari alokasi anggaran.
- c) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Perkembangan Pemberian Bantuan dengan output kegiatan laporan monitoring dan Evaluasi dengan alokasi anggaran Rp.50.000.000,00, dan terealisasi per 31 Desember 2020 sebesar Rp.49.983.600,00,- atau 99,97% dari alokasi anggaran.
- d) Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Barang/Aset dengan output kegiatan terwujudnya peningkatan pengelolaan barang dengan alokasi anggaran 4.000.000,00,- dan terealisasi per 31 Desember 2020 sebesar Rp.4.000.000,00,- atau 100 % dari alokasi anggaran.
- e) Kegiatan Laporan PENCEPATAN Penerapan SPM dengan output kegiatan jumlah dokumen SPM yang tersusun dengan alokasi

anggaran 4.000.000,00,- dan terealisasi per 31 Desember 2020 sebesar Rp.4.000.000,00,- atau 100 % dari alokasi anggaran.

- f) Kegiatan Penyusunan LAKIP dengan output kegiatan Terlaksananya penyusunan LAKIP dengan alokasi anggaran 4.000.000,00,- dan terealisasi per 31 Desember 2020 sebesar Rp.4.000.000,00,- atau 100 % dari alokasi anggaran.
- g) Pemutakhiran Data Masyarakat Miskin dengan alokasi anggaran 260.000.000,00,- dan terealisasi per 31 Desember 2020 sebesar Rp.253.402.000,00,- atau 97,46 % dari alokasi anggaran.

5) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan output kegiatan terlaksananya pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya, dengan alokasi anggaran anggaran Rp. 2.416.870.000,- dan terealisasi per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 2.356.689.600,- .atau 97,51% dari alokasi anggaran, adapun rincian kegiatan dari Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya sebagai berikut :

- a) Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Keluarga Miskin melalui UEP dengan output kegiatan keluarga miskin memperoleh bantuan UEP dengan alokasi anggaran Rp. 1.157.250.000,00,- dan terealisasi per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 1.157.166.750,00,- atau 99,99 % dari alokasi anggaran.

- b) Kegiatan Penunjang Pelaksanaan Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT, dan PMKS Linnya dengan output kegiatan tersedianya program pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS laina dengan alokasi anggaran Rp. 7.774.000,00,- dan terealisasi per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 7.774.000,00,- atau 100 % dari alokasi anggaran.
- c) Kegiatan Pembinaan dan pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi melalui UEP dengan output kegiatan wanita rawan sosial ekonomi memperoleh bantuan UEP dengan alokasi anggaran Rp. 100.000.000,00,- dan terealisasi per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 99.800.000,00,- atau 99,80 % dari alokasi anggaran.
- d) Kegiatan pembinaan dan pemberdayaan keluarga rentan melalui UEP dengan output kegiatan keluarga rentan memperoleh bantuan usaha dengan alokasi anggaran Rp. 100.000.000,00,- dan terealisasi per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 100.000.000,00,- atau 100 % dari alokasi anggaran.
- e) Kegiatan penyediaan bantuan kelangsungan hidup bagi keluarga fakir miskin dengan output kegiatan masyarakat miskin yang memperoleh bantuan dengan alokasi anggaran Rp. 198.050.000,00,- dan terealisasi per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 197.981.480,00,- atau 99,97 % dari alokasi anggaran.
- f) Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Keluarga Miskin melalui KUBE dengan output keluarga miskin memperoleh bantuan usaha dengan alokasi anggaran Rp.148.850.000,00,- dan terealisasi per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 148.849.700,00,- atau 99,99 % dari alokasi anggaran.
- g) Kegiatan Pengawasan, Pemantauan/Distribusi BPNT dengan alokasi anggaran Rp.53.804.000,00,- dan terealisasi per 31

Desember 2020 sebesar Rp. 53.803.600,00,- atau 99,99 % dari alokasi anggaran.

6) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial bertujuan untuk terwujudnya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial, dengan alokasi anggaran Rp. 6.557.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.851.735.120,- atau 28,24 % dari alokasi anggaran, adapun rincian kegiatan dari program pelayanan dan rehabilitasi sebagai berikut :

- a) Kegiatan Penanganan Masalah-Masalah Strategis Yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa dengan output kegiatan terwujudnya pelayanan Korban Bencana Alam dengan alokasi anggaran Rp. 100.000.000,- dan terealisasi per 31 Desember 2020 sebesar Rp.99.975.000,00,- atau 99,99 % dari alokasi anggaran.
- b) Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Lanjut Usia Jompo Potensial melalui UEP dengan output kegiatan terwujudnya pembinaan dan pemberdayaan lanjut usia jompo potensial melalui UEP dengan alokasi anggaran Rp.87.000.000,00,- dan terealisasi per 31 Desember 2020, sebesar Rp.86.935.000,00,- atau 99,93 % dari alokasi anggaran.
- c) Kegiatan Pelayanan dan Penanganan Orang Terlantar dengan output kegiatan orang terlantar mendapatkan pelayanan dengan alokasi anggaran Rp.34.700.000,00,- dan terealisasi per 31 Desember 2020 sebesar Rp.43.662.800,00,- atau 99,89 % dari alokasi anggaran.
- d) Kegiatan Pelayanan dan Penanganan Korban Bencana Sosial dengan output kegiatan korban bencana sosial memperoleh bantuan dengan alokasi anggaran Rp.228.000.000,00,- dan

teralisasi per 31 Desember 2020 sebesar Rp.227.900.000,00,- atau 99,96 % dari alokasi anggaran.

- e) Kegiatan Penunjang dan operasional Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dengan output kegiatan terwujudnya Rumah Tidak Layak Huni dengan alokasi anggaran Rp260.750.000,00,- dan terealisasi per 31 Desember 2020 sebesar Rp.231.950.000.,00,- atau 88,95% dari alokasi anggaran.
- f) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dengan output kegiatan terwujudnya rumah layak huni dengan alokasi anggaran Rp260.750.000,00,- dan terealisasi per 31 Desember 2020 sebesar Rp.231.950.000.,00,- atau 88,95% dari alokasi anggaran.
- g) Kegiatan pengadaan bantuan pangan dengan output kegiatan bantuan pangan teralisasi dengan alokasi anggaran Rp.592.820.000,00,- dan terealisasi per 31 Desember 2020 sebesar Rp.592.815.400,00,- atau 99,99% dari alokasi anggaran.

7) Program Pembinaan Anak Terlantar

Program Pembinaan Anak Terlantar dengan output program yaitu tertanganinya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Pembinaan Anak Terlantar dengan alokasi anggaran Rp. 180.000.000,- dan terealisasi per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 156.372.732,- atau 86,87 % dari alokasi anggaran, adapun rincian kegiatan dari Program Pembinaan Anak Terlantar sebagai berikut:

- a) Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Pekerja Sosial Anak dengan output kegiatan pekerja sosial anak mendapatkan peningkatan kesejahteraan dengan alokasi anggaran Rp.

30.000.000,- dan terealisasi per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 29.998.000,00,- atau 99,99 % dari alokasi anggaran.

- b) Kegiatan Pendampingan Anak yang Bermasalah Hukum (ABH) dengan output kegiatan ABH mendapatkan pendampingan hokum dengan alokasi anggaran Rp. 35.800.000,00,- dan terealisasi per 31 Desember 2020 sebesar Rp.30.596.100.00,- atau 85,46 % dari alokasi anggaran.
- c) Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Anak Terlantar dengan output kegiatan anak terlantar memperoleh bantuan dengan alokasi anggaran Rp.87.000.000,00,- dan terealisasi per 31 Desember 2020 sebesar Rp.86.975.000.000,00,- atau 99,97 % dari alokasi anggaran.
- d) Kegiatan Penunjang Operasional Pemberian Tunjangan Hidup bagi Anak Yatim Piatu dengan output kegiatan Anak Terlantar memperoleh tunjangan hidup dengan alokasi anggaran Rp.43.500.000,00,- dan teralisasi per 31 Desember 2020 sebesar Rp.43.500.000,00,- atau 100% dari alokasi anggaran
- e) Peksos Go To School dengan alokasi anggaran Rp.2.000.000,00,- dan teralisasi per 31 Desember 2020 sebesar Rp.1.912.000,00,- atau 95,60% dari alokasi anggara.

8). Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma

Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma bertujuan untuk terwujudnya pembinaan para penyandang cacat dan trauma dengan alokasi anggaran Rp. 70.000.000,- dan terealisasi per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 69.875.000,- atau 99,82 % dari alokasi anggaran. Adapun rincian dari Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma adalah sbb :

- a) Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan penyandang cacat melalui UEP dengan output kegiatan terwujudnya pembinaan

penyandang cacat melalui UEP dengan alokasi anggaran Rp. 94.000.000,00,-dan teralisasi per 31 Desember 2020 sebesar Rp.94.000.000,00,- atau 100% dari alokasi anggara.

- b) Kegiatan Penunjang Operasional Pemberian Tunjangan Hidup Bagi Penyandang cacat Fisik dan Mental dengan output kegiatan terwujudnya pemberian tunjangan hidup bagi penyandang cacat fisik dan mental dengan alokasi anggaran Rp. 50.000.000,00,-dan teralisasi per 31 Desember 2020 sebesar Rp.49.961.000,00,- atau 99,92 % dari alokasi anggara.

9) Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya).

Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK,narkoba dan penyakit sosial lainnya) dengan output program tertanganinya penyandang masalah kesejahteraan sosial dengan alokasi anggaran Rp. 30.000.000,- dan terealisasi per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 30.000.000,- atau 100 % dari alokasi anggaran. Adapun rincian dari Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK,narkoba dan penyakit sosial lainnya) adalah sbb :

- a). Kegiatan pembinaan dan pemberdayaan Eks Narapidana melalui UEP dengan output kegiatan terwujudnya pembinaan dan pemberdayaan eks narapidana dengan alokasi anggaran Rp. 50.000.000,00,-dan teralisasi per 31 Desember 2020 sebesar Rp.49.813.000,00,- atau 99,63 % dari alokasi anggara.

10) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial bertujuan untuk terwujudnya pemberdayaan kelembagaan

kesejahteraan sosial dengan alokasi anggaran Rp. 467.000.000,- dan terealisasi per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 464.257.075,- atau 99,41 % dari alokasi anggaran, dengan rincian sbb :

- a) Kegiatan penunjang kegiatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) dengan output kegiatan meningkatnya pelayanan konsultasi kesejahteraan keluarga dengan alokasi anggaran Rp. 20.000.000,- dan terealisasi per 31 Desember 2020 sebesar Rp.20.000.000,- atau 100 % dari alokasi anggaran.
- b) Kegiatan Pembinaan dan pemberdayaan Karang Taruna dengan output kegiatan Karang Taruna memperoleh pembinaan dan pemberdayaan dengan alokasi anggaran Rp. 94.750.000.000,- dan terealisasi per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 94.750.000.000,- atau 100 % dari alokasi anggaran.
- c) Kegiatan Penunjang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) dengan output kegiatan terwujudnya Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) dengan alokasi anggaran Rp. 52.000.000,00,- dan terealisasi per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 51.905.000,- atau 99,82 % dari alokasi anggaran.
- d) Kegiatan Penunjang operasional kegiatan PSKS dengan output kegiatan Penunjang PSKS terwujud dengan alokasi anggaran Rp. 2.000.000,00,- dan terealisasi per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 2.000.000,00,- atau 100 % dari alokasi anggaran.
- e) Kegiatan Penunjang Operasional Pemberian Tunjangan Hidup bagi Lanjut Usia Terlantar (Non Potensial) dengan output kegiatan pemberian tunjangan hidup bagi lanjut usia terlantar dengan alokasi anggaran Rp. 130.000.000,00,- dan terealisasi per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 129.997.000,00,- atau 100 % dari alokasi anggaran.

- f) Kegiatan penunjang operasional dan peningkatan kesejahteraan bagi Taruna Siaga Bencana dengan output kegiatan anggota TAGANA memperoleh kesejahteraan dengan alokasi anggaran Rp. 90.000.000,00,- dan teralisasi per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 89.975.000,00,- atau 99,97 % dari alokasi anggaran.
- g) Kegiatan Penunjang operasional dan pemeliharaan kendaraan dinas Siaga Bencana (kapal, mobil duplek dan motor) dengan output kegiatan terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas dengan alokasi anggaran Rp. 33.500.000,00,- dan teralisasi per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 33.476.440,00,- atau 99,93 % dari alokasi anggaran.
- h) Kegiatan operasional Program Keluarga Harapan (PKH) dengan output kegiatan presentase masyarakat miskin penerima bantuan PKH dengan alokasi anggaran Rp. 286.000.000,00,- dan teralisasi per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 286.000.000,00,- atau 100 % dari alokasi anggaran.
- i) Kegiatan pembangunan gudang logistik bencana dengan alokasi anggaran Rp. 10.000.000,00,- dan teralisasi per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 10.000.000,00,- atau 100 % dari alokasi anggaran.
- j) Kegiatan peningkatan dan penguatan kelembagaan PSKS dengan alokasi anggaran Rp. 12.500.000,00,- dan teralisasi per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 12.500.000,00,- atau 100 % dari alokasi anggaran.
- k) Kegiatan penunjang operasional tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) dengan alokasi anggaran Rp. 50.000.000,00,- dan teralisasi per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 50.000.000,00,- atau 100 % dari alokasi anggaran.

11) Program Pelestarian NK.3

Program Pelestarian NK.3 bertujuan untuk terlaksananya program Pelestarian NK.3 dengan alokasi anggaran Rp. 148.000.000,- dan terealisasi per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 148.000.000,- atau 100 % dari alokasi anggaran dengan rincian sebagai berikut :

- a. Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan dengan output kegiatan TMP terpelihara dengan alokasi anggaran Rp. 18.000.000,00,- dan teralisasi per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 18.000.000,00,- atau 100 % dari alokasi anggaran.
- b. Kegiatan Peringatan Hari Pahlawan dengan output kegiatan meningkatnya pemahaman dan penghayatan nilai-nilai kepahlawanan dalam kehidupan masyarakat dengan alokasi anggaran Rp. 20.000.000,00,- dan teralisasi per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 19.400.000,00,- atau 97,00 % dari alokasi anggaran.
- c. Kegiatan Pemberian Bantuan kepada Janda/Ahli Waris Pahlawan dengan output kegiatan keluarga pahlawan memperoleh bantuan dengan alokasi anggaran Rp. 45.000.000,00,- dan teralisasi per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 45.000.000,00,- atau 100 % dari alokasi anggaran.
- d. Kegiatan Pelaksanaan Anjangsana dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan RI dengan output kegiatan terwujudnya anjangsana dengan alokasi anggaran Rp. 17.000.000,00,- dan teralisasi per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 17.000.000,00,- atau 100 % dari alokasi anggaran.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Sosial merupakan salah satu SKPD di Kabupaten Kepulauan Selayar yang berurusan langsung dengan pelayanan terhadap masyarakat, seperti surat keterangan miskin, dan mediator perselisihan industrial. Dinas Sosial, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat selalu mengedepankan pelayanan prima, namun dalam menjalankan tugas tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa memiliki berbagai hambatan dan tantangan. Pelayanan Dinas Sosial ini tidak hanya dilakukan secara langsung saja, namun pembenahan terus dilakukan termasuk dalam informasi melalui media, salah satunya adalah web resmi yang dimiliki oleh Dinas Sosial yang memuat terkait informasi terkini tentang penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Penerapan SPM dan pemenuhan pelayanan dasar tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah baik Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Jenis Pelayanan Dasar SPM Bidang Sosial bagi Pemerintah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut.

1. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitastelantar di luar panti
2. rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luarpanti
3. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar diluar panti
4. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnyagelandangan dan pengemis di luar panti
5. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dansetelah tanggap darurat bencana bagi korbanbencana kabupaten/kota

**Realisasi pencapaian SPM tahun 2020 Bidang Sosial pada Dinas
Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar digambarkan pada tabel berikut:**

No	Jenis Pelayanan (Indikator SPM)	Struktur Pencapaian	Target SPM 2020 (%)	Capaian (%)
1	Persentase penduduk penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	$\frac{\text{Jumlah Penyandang Disabilitas yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 tahun}}{\text{Jumlah Penyandang Disabilitas Yang seharusnya memperoleh bantuan sosial}} \times 100 \%$ $\frac{154}{832} \times 100 \%$	100 %	18,99 %
2	Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	$\frac{\text{Jumlah anak terlantar yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 tahun}}{\text{Jumlah Anak terlantar Yang seharusnya memperoleh bantuan sosial}} \times 100 \%$ $\frac{119}{372} \times 100 \%$	100 %	31,99 %
3	Persentase penduduk lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	$\frac{\text{Jumlah lanjut usia terlantar yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 tahun}}{\text{Jumlah lanjut usia terlantar Yang seharusnya memperoleh bantuan sosial}} \times 100 \%$ $\frac{700}{4033} \times 100 \%$	100 %	17,35 %
4	Persentase penduduk/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial	$\frac{\text{Jumlah Gelandangan dan pengemis yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 tahun}}{\text{Jumlah gelandangan dan pengemis}} \times 100 \%$	100 %	25 %

	dasar tuna sosial di luar panti	Yang seharusnya memperoleh bantuan sosial $\frac{1}{4} \times 100 \%$		
5	Persentase penduduk korban bencana yang memperoleh perlindungan	Jumlah korban bencana dalam 1 tahun yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat $\frac{\text{Jumlah korban bencana dalam 1 tahun yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat}}{32} \times 100 \%$ 32 $\frac{32}{32} \times 100 \%$	100 %	100 %

2.3. Isu-isu penting pentelenggaraan tugas dan fungsi perangkat Daerah

Sebelum menentukan isu-isu Strategis, ada beberapa hal yang menjadi acuan dalam menentukan isu-isu strategis tersebut, diantaranya adalah:

Sasaran Jangka Menengah Pada Renstra Kementerian Sosial Tahun 2010-2014 adalah:

- a. Mencegah PMKS dari keterpurukan akibat risiko sosial, perlakuan salah, tindak kekerasan, dan eksploitasi sosial
- b. Memberikan layanan langsung untuk memberikan perlindungan PMKS dalam menghadapi risiko sosial dalam menghadapi risiko sosial, kebencanaan, perlakuan salah, tindak kekerasan dan eksploitasi sosial
- c. Memberikan dukungan bagi PMKS baik kelompok rentan maupun kelompok berisiko sosial dalam menghadapi permasalahan

- kebencanaan, perlakuan salah, tindak kekerasan, dan eksploitasi sosial
- d. RTSM (ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, anak usia sekolah dasar)
 - e. Penduduk yang bekerja di sektor informal berpenghasilan rendah yang tidak tercakup dalam sistem asuransi formal
 - f. Fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis
 - g. Pejuang, perintis kemerdekaan dan keluarga pahlawan
 - h. Penyandang cacat berat dan cacat ganda, lanjut usia nonpotensial, eks penderita penyakit kronis, dan penyandang cacat psikotik
 - i. Meningkatnya kemauan dan kemampuan individu, keluarga, kelompok dan masyarakat miskin serta komunitas adat terpencil dalam memenuhi kebutuhan dasar
 - j. Meningkatnya kemampuan dan kemauan masyarakat, lembaga kesejahteraan sosial, dan dunia usaha dalam pemberdayaan social
 - k. Meningkatnya pemahaman dan gerakan kesetiakawanan social
 - l. Tersedianya layanan PMKS (anak, lanjut usia, penyandang cacat, korban napza, dan tunasosial) sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM) secara nasional
 - m. Kualifikasi untuk SDM Kesejahteraan Sosial dalam pelayanan rehabilitasi sosial pada setiap unit layanan berpendidikan S-1 atau D-4 Pekerjaan Sosial
 - n. Seluruh unit layanan sosial menerapkan system pelayanan kesejahteraan sosial sesuai dengan standardisasi dan akreditasi layanan
 - o. Tersedianya sarana dan prasarana penanggulangan bencana, pelayanan rehabilitasi sosial baik panti dan diluar panti kabupaten/kota dan nonpanti

Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar mengacu pada sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Sosial berdasarkan acuan tersebut maka sasaran jangka menengah dari Renstra Dinas Sosial adalah ;

- a. Terwujudnya peningkatan taraf kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial
- b. Terwujudnya pengembangan PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial) melalui penguatan organisasi yang bergerak dibidang kesejahteraan sosial untuk mewujudkan ketahanan sosial masyarakat

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan tahun 2022 pada Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar tergambar pada Tabel dibawah ini

TABEL TC. 32
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN ANGGARAN 2022
DINAS SOSIAL KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
a.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Dokumen yang dihasilkan	2 Dokumen	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Dokumen yang dihasilkan	1 Dokumen	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Dokumen yang dihasilkan	1 Dokumen	
4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Dokumen yang dihasilkan	1 Dokumen	

5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Dokumen yang dihasilkan	1 Dokumen	
6	Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Dokumen yang dihasilkan	1 Dokumen	
7	Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Dokumen yang dihasilkan	1 Dokumen	
b.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terlaksananya Administrasi Keuangan dengan Baik		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kep. Selayar	Jumlah ASN Dinas Sosial	24 Orang	
2	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Dokumen yang dihasilkan	1 Dokumen	
3	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Dokumen yang dihasilkan	12 Dokumen	
4	Koordinasi dan Pelaksanaan akuntansi SKPD	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Dokumen yang dihasilkan	1 Dokumen	
5	Pengelolaan dan Penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Dokumen yang dihasilkan	1 Dokumen	
6	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Progres Realisasi Anggaran	Kab. Kep. Selayar		1 Dokumen	
c.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah dengan baik		
1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan barang milik daerah SKPD	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Dokumen yang dihasilkan	1 Dokumen	
2	Rekonsiliasi dan Penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Dokumen yang dihasilkan	1 Dokumen	
3	Penatausahaan barang milik daerah	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Dokumen yang dihasilkan		
d.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi kepegawaian		
1	Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	Kab. Kep. Selayar	Jumlah sarana dan prasarana pegawai yang disiapkan	2 Unit	
2	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Kab. Kep. Selayar	Jumlah pegawai yang memperoleh pakaian dinas dan kelengkapan lainnya	25 ASN	

3	Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Dokumen yang dihasilkan	1 Dokumen	
4	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Kab. Kep. Selayar	Jumlah ASN Yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	6 ASN	
e.	Admintrasi umum perangkat daerah		Terlaksananya administrasi umum dengan baik		
1	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Kep. Selayar	Terlaksananya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	1 Tahun	
2	Penyediaan bahan logistik kantor	Kab. Kep. Selayar	Tersedianya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	
3	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kab. Kep. Selayar	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	
4	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kab. Kep. Selayar	Tersedianya jasa perizinan kendaraan Dinas/Operasional	1 Tahun	
f.	Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah				
1	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Kab. Kep. Selayar	Jumlah peralatan dan mesin yang diadakan	9 Unit	
2	Pengadaan Mebel	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Perlengkapan kantor yang diadakan	11 Unit	
3	Pengadaan gedung kantor dan bangunan lainnya	Kab. Kep. Selayar	Jumlah gedung yang di bangun		
4	Pengadaan Saran dan Prasarana pendukung gedung kantor atau banugnan lainnya	Kab. Kep. Selayar	Jumlah sarana dan prasarana rumah singgah	3 Set	
g.	Peyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
1	Peyediaan jasa surat meyrat	Kab. Kep. Selayar	Tersedianya jasa surat menyurat	12 Bulan	
2	Peyediaan jasa kominikasi,sumber daya air dan listrik	Kab. Kep. Selayar	Tersedianya Peyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	12 Bulan	
3	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kab. Kep. Selayar	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	12 Bulan	
h	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah				

1	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Kab. Kep. Selayar	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi (LK3)	2 Unit	
2	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, paja, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kab. Kep. Selayar	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas (Operasional)	1 Tahun	
3	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kab. Kep. Selayar	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	57 Unit	
4	Pemeliharaan aset tetap lainnya	Kab. Kep. Selayar	jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	57 Unit	
5	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Aset tak berwujud yang dipelihara		
B	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				
a.	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)		Terlaksananya Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)		
1	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Masyarakat KAT yang difasilitasi Permakanan		
2	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Kab. Kep. Selayar	Tersedianya Dokumen Study Kelayakan Lokasi KAT	1 Paket	
b.	Pengembangan Potensi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		Meningkatnya Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		
1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang Meningkatkan Kemampuannya	20 Orang	
2	Peningkatan Kemampuan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kab/Kota	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Yng meningkatkan kemampuannya	11 Orang	
3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kab/Kota	Kab. Kep. Selayar	Jumlah PSKS Keluarga yang Meningkatkan Kemampuannya	5 Orang	
4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kab/Kota	Kab. Kep. Selayar	Jumlah PSKS Lembaga (Karang Taruna) yang Meningkatkan Kemampuannya	3 Karang Taruna	

5	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Klien LK3 yang Mendapatkan Pelayanan kesejahteraan keluarga	15 Orang	
C	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				
a.	Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial.		Terlaksananya rehabilitasi sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial.		
1	Penyediaan Permakanan	Kab. Kep. Selayar	Jumlah penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar serta Gelandangan pengemis yang memperoleh bantuan permakanan	600 KPM	
2	Penyediaan Sandang	Kab. Kep. Selayar	Jumlah penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar serta Gelandangan pengemis yang memperoleh bantuan Sandang.	250 Orang	
3	Penyediaan Alat Bantu	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial yang diberi bantuan	100 Orang	
4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi dan Keluarga		Jumlah Keluarga yang di Reunifikasi		
5	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Pendamping PKH yang Memberikan Bimbingan/ Pendampingan	30 Orang	
6	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak	Kab. Kep. Selayar	Penunjang Operasional Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan kartu Identitas Anak		

7	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan Dan Kesehatan Dasar	Kab. Kep. Selayar	Penunjang operasional pemberian Akses Layanan Pendidikan Dan Kesehatan Dasar.		
8	Pemberian Layanan Data Dan Pengaduan	Kab. Kep. Selayar	Penunjang Operasional Pemberian Layanan Data Dan Pengaduan.		
9	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Anak yang berhadapan Hukum yang didampingi (ABH)	1 Tahun	
10	Pemberian pelayanan Penelusuran Keluarga	Kab. Kep. Selayar			
11	Pemberian Layanan Rujukan	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Orang Dalam Gangguan Jiwa Yang Tertangani	10 Orang	
b	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan NAPZA di luar Panti Sosial	Kab. Kep. Selayar	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan NAPZA di luar Panti Sosial		
1	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Penerima BPNT/Sembako yang di pantau dan diawasi penyalurannya	12597 KPM	
2	Penyediaan Permakanan	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Masyarakat Miskin yang memperoleh bantuan permakanan	1000 KK	
3	Penyediaan Sandang	Kab. Kep. Selayar	Jumlah masyarakat Miakin yang memperoleh bantuan sandang		
4	Penyediaan Alat Bantu	Kab. Kep. Selayar	Jumlah PMKS yang menerima bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)		
5	Pemberian Pelayanan dan Reunifikais Keluarga	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Keluarga/ahli waris pahlawan yang mendapatkan penghargaan	27 KK	
6	Pemberian Layanan Rujukan	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Masyarakat Miskin yang memperoleh bantuan Perbaikan Rumah	300 KK	
7	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kab. Kep. Selayar	Penunjang operasional Pemberian Layanan Kedaruratan		

8	Penyediaan perbekalan kesehatan di luar panti	Kab. Kep. Selayar	Penunjang operasional perbekalan kesehatan di luar panti		
9	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kab. Kep. Selayar	Penunjang operasional Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		
10	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya buksn korban HIV/Aids dan NAPZA	Kab. Kep. Selayar	Terlaksananya Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya buksn korban HIV/Aids dan NAPZA		
11	Fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas anak	Kab. Kep. Selayar	penunjang operasional Fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas anak		
12	Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Kab. Kep. Selayar	Terwujudnya pelayanan pada SLRT	1 Tahun	
13	Pemberian pelayanan penulsuran keluarga	Kab. Kep. Selayar	Penunjang operasional Pemberian pelayanan penulsuran keluarga		
D	PROGRAM PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL				
a.	Pemeliharaan Anak Terlantar		Terlaksananya Pemeliharaan Anak Terlantar		
1	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Anak Terlantar Yang Berhasil Di Jangkau	50 Orang	
2	Rujukan Anak- Anak Terlantar	Kab. Kep. Selayar	Jumlah anak terlantar Yang Mendapatkan Bantuan	30 Orang	
3	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Kab. Kep. Selayar	Penunjang Operasional Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Anak Terlantar		
b	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		
1	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kep. Selayar	Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Dengan Aplikasi Siks-Ng Dan SIRT Serta web Dinas Sosial	2 Aplikasi dan 1Web	

2	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Lanjut Usia Terlantar, Penandang Disabilitas Dan Anak Yatim Piatu Yang Mendapatkan Bantuan Tunjangan Hidup		
3	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Korban Bencana Yang Mendapatkan Bantuan Ekonomi		
E	PROGRAM PENANGANAN BENCANA				
a.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Dan Sosial Kabupaten/ Kota		Terlaksananya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Dan Sosial Kabupaten/ Kota		
1	Penyediaan Makanan	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Korban Bencana Yang mendapatkan Bantuan Permakanan	200 KK Korban Bencana	
2	Penyediaan Sandang	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Korban Bencana Yang Mendapatkan Bantuan Sandang	100 KK	
3	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Korban Bencana/Orang Terlantar Yang Ditampung	100 KK	
4	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Keluarga Rentan Yang Mendapatkan Bantuan		
5	Pelayanan Dukungan Psikososial	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Korban bencana yang mendapatkan dukungan psikososial		
b	Peyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota		Terlaksananya Peyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota		
1	Koordinasi, Sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana	Kab. Kep. Selayar	Jumlah anggota Taruna Siaga Bencana (TAGANA) yang mendapatkan tali asih	100%	
2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Kab. Kep. Selayar	Penunjang operasional Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana		
F	PROGRAM PENGELOLAAN TAMA MAKAN PAHLAWAN				
a.	Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota		Terlaksananya Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota		

1	Rehabilitasi sarana dan prasarana taman pahlawan nasional kabupaten/kota	Kab. Kep. Selayar	Rehab Pagar TMP		
2	Pemeliharaan Taman Makan Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Kep. Selayar	Pemeliharaan TMP dan Pelaksanaan Hari Pahlawan	1 Tahun	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Untuk melaksanakan pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia Kementerian Sosial telah menyusun Renstra Tahun 2015 – 2019 dengan sasaran sebagai berikut:

- a. Mencegah PMKS dari keterpurukan akibat risiko sosial, perlakuan salah, tindak kekerasan, dan eksploitasi sosial
- b. Memberikan layanan langsung untuk memberikan perlindungan PMKS dalam menghadapi risiko sosial dalam menghadapi risiko sosial, kebencanaan, perlakuan salah, tindak kekerasan dan eksploitasi sosial
- c. Memberikan dukungan bagi PMKS baik kelompok rentan maupun kelompok berisiko sosial dalam menghadapi permasalahan kebencanaan, perlakuan salah, tindak kekerasan, dan eksploitasi sosial
- d. RTSM (ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, anak usia sekolah dasar)
- e. Penduduk yang bekerja di sektor informal berpenghasilan rendah yang tidak tercakup dalam sistem asuransi formal
- f. Fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis
- g. Pejuang, perintis kemerdekaan dan keluarga pahlawan
- h. Penyandang cacat berat dan cacat ganda, lanjut usia nonpotensial, eks penderita penyakit kronis, dan penyandang cacat psikotik

- i. Meningkatnya kemauan dan kemampuan individu, keluarga, kelompok dan masyarakat miskin serta komunitas adat terpencil dalam memenuhi kebutuhan dasar
- j. Meningkatnya kemampuan dan kemauan masyarakat, lembaga kesejahteraan sosial, dan dunia usaha dalam pemberdayaan social
- k. Meningkatnya pemahaman dan gerakan kesetiakawanan social
- l. Tersedianya layanan PMKS (anak, lanjut usia, penyandang cacat, korban napza, dan tunasosial) sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM) secara nasional
- m. Kualifikasi untuk SDM Kesejahteraan Sosial dalam pelayanan rehabilitasi sosial pada setiap unit layanan berpendidikan S-1 atau D-4 Pekerjaan Sosial
- n. Seluruh unit layanan sosial menerapkan system pelayanan kesejahteraan sosial sesuai dengan standardisasi dan akreditasi layanan
- o. Tersedianya sarana dan prasarana penanggulangan bencana, pelayanan rehabilitasi sosial baik panti dan diluar panti kabupaten/kota dan nonpanti

Yang kemudian diwujudkan menjadi program dan kegiatan agar sasaran-sasaran tersebut dapat tercapai. Telaahan mengenai Renstra Kementerian Sosial Sejalan dengan itu Bidang Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar telah menyusun program kerja 6 (enam) program prioritas beserta kegiatannya untuk mendukung program kerja yang ada di pemerintah pusat dan ikut serta mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial seperti termuat dalam Renstra Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021-2026.

Melalui kebijakan otonomi daerah, pemerintah memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah, khususnya daerah

kabupaten/kota untuk menyelenggarakan pembangunan dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kenyataan menunjukkan bahwa pemberian otonomi tersebut tidak sepenuhnya berjalan mulus, karena masih sering ditemukan adanya eksekusi negatif yang mengakibatkan terjadinya hambatan dalam pelaksanaan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial. Perubahan ini hendaknya disikapi secara arif, bijaksana, dan diarahkan pada terwujudnya pemahaman dan komitmen pelaku pembangunan kesejahteraan sosial di setiap daerah kabupaten.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan yang hendak dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Sosial adalah Meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat

Berdasarkan tujuan tersebut diatas, maka sasaran yang ingin dicapai adalah Berkurangnya penduduk miskin.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Penjabaran kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

- A. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD
 - d. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD
 - e. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD
 - f. Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
 - c. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD
 - d. Koordinasi dan Pelaksanaan akuntansi SKPD
 - e. Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan
 - f. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Progresis Realisasi Anggaran
- C. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan barang milik daerah SKPD
 - b. Rekonsiliasi dan penyusunan laporan milik daerah pada SKPD
 - c. Penatausahaan barang milik daerah

- D. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai
 - b. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
 - c. Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian
 - d. Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
- E. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
 - b. Penyediaan bahan logistik kantor
 - c. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - d. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- F. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
 - b. Pengadaan mebel
 - c. Pengadaan gedung kantor dan bangunan lainnya
 - d. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya
- G. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan jasa surat menyurat
 - b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - c. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- H. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
 - a. Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
 - b. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
 - c. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
 - d. Pemeliharaan aset tetap lainnya
 - e. Pemeliharaan aset tak terwujud

2. Program Pemberdayaan Sosial

- A. Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)
 - a. Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT
 - b. Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT
- B. Pengembangan Potensi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
 - b. Peningkatan Kemampuan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kab/Kota
 - c. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kab/Kota
 - d. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kab/Kota
 - e. Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

3. Program Rehabilitasi Sosial

- A. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
 - a. Penyediaan permakanan
 - b. Penyediaan sandang
 - c. Penyediaan alat bantu
 - d. Pemberian pelayanan reunifikasi dan keluarga
 - e. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
 - f. Fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah dan kartu identitas anak
 - g. Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar

- h. Pemberian layanan data dan pengaduan
 - i. Pemberian layanan kedaruratan
 - j. Pemberian layanan penelusuran keluarga
 - k. Pemberian layanan rujukan
- B. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/Aids dan NAPZA di luar Panti Sosial
- a. Pemberian layanan data dan pengaduan
 - b. Penyediaan permakanaan
 - c. Penyediaan sandang
 - d. Penyediaan alat bantu
 - e. Pemberian layanan dan reunifikasi keluarga
 - f. Pemberian layanan rujukan
 - g. Pemberian layanan kedaruratan
 - h. Penyediaan perbekalan kesehatan di luar panti
 - i. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial
 - j. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/Aids dan NAPZA
 - k. Fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah dan kartu identitas anak
 - l. Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar
 - m. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga

4. Program Perlindungan Jaminan Sosial

- A. Pemeliharaan anak terlantar
 - a. Penjangkauan Anak-anak terlantar
 - b. Rujukan Anak-anak terlantar
 - c. Pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak terlantar

- B. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga
 - c. Fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat

5. Program Penanganan Bencana

- A. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
 - a. Penyediaan makanan
 - b. Penyediaan sandang
 - c. Penyediaan tempat penampungan pengungsi
 - d. Penanganan khusus bagi kelompok rentan
 - e. pelayanan dukungan psikossosial
- B. Penyelenggaraan Pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota
 - a. Koordinasi, Sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana
 - b. Koordinasi, Sosialisasi dan pelaksanaan kampung siaga bencana

6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

- A. Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota
 - a. Rehabilitasi sarana dan prasarana taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota
 - b. Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota

Rumusan rencana program dan kegiatan perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 dan perkiraan Maju tahun 2023 terdapat pada tabel TC. 33, sebagai berikut : (Terlampir)

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar diharapkan dapat menjadi dokumen yang mampu memberikan arah strategis, target dan sasaran yang tepat dan fleksibel dengan perkembangan situasi yang terjadi khususnya dalam bidang pembangunan kesejahteraan sosial dan kondisi Kabupaten Kepulauan Selayar yang unik dan spesifik.

Renja ini wajib dipahami, dihayati dan dilaksanakan khususnya oleh segenap aparatur di lingkup Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar dan dalam implementasinya dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait dan diharapkan dapat dijadikan acuan bagi Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar dan segenap unsur/ komponen terkait agar dalam rangka upaya pemberdayaan masyarakat termasuk penyandang masalah kesejahteraan sosial dapat dilaksanakan secara menyeluruh dan terpadu.

Benteng, 1 Juni 2021

KEPALA DINAS SOSIAL,
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR



RATTA AMIR, SP
Pembina Utama Muda
Nip. 19641127 198711 1 003

TABEL TC. 33
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022 DAN PERKIRAAN MAJU 2023
DINAS SOSIAL KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Bld. Urusan	Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Rencana Tahun 2022			Perkiraan Maju tahun 2023	
	Pro gram	Sub. Kegi atan				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
06			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							29.597.600.000
06	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							5.065.100.000
06	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			141.000.000			195.000.000
06	01	2.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang dihasilkan	ASN	Kab. Kep. Selayar	15.000.000		2 Dokumen	20.000.000
06	01	2.01	02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen yang dihasilkan	ASN	Kab. Kep. Selayar	10.000.000		1 Dokumen	15.000.000
06	01	2.01	03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen yang dihasilkan	ASN	Kab. Kep. Selayar	10.000.000		1 Dokumen	15.000.000
06	01	2.01	04 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen yang dihasilkan	ASN	Kab. Kep. Selayar	10.000.000		1 Dokumen	15.000.000
06	01	2.01	05 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen yang dihasilkan	ASN	Kab. Kep. Selayar	10.000.000		1 Dokumen	15.000.000
06	01	2.01	06 Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen yang dihasilkan	ASN	Kab. Kep. Selayar	10.000.000		1 Dokumen	15.000.000
06	01	2.01	07 Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang dihasilkan	ASN	Kab. Kep. Selayar	76.000.000		1 Dokumen	100.000.000
06	01	02.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan dengan Baik			2.367.122.919			2.585.100.000

06	01	02.2	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN Dinas Sosial	ASN	Kab. Kep. Selayar	24 Orang	2.327.122.919		24 Orang	2.510.100.000
06	01	02.2	05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Dokumen yang dihasilkan	ASN	Kab. Kep. Selayar	1 Dokumen	10.000.000		1 Dokumen	20.000.000
06	01	02.2	07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Jumlah Dokumen yang dihasilkan	ASN	Kab. Kep. Selayar	12 Dokumen	10.000.000		12 Dokumen	15.000.000
06	01	02.2	04	Koordinasi dan Pelaksanaan akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen yang dihasilkan	ASN	Kab. Kep. Selayar	1 Dokumen	10.000.000		1 Dokumen	15.000.000
06	01	02.2	06	Pengelolaan dan Penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Jumlah Dokumen yang dihasilkan	ASN	Kab. Kep. Selayar	1 Dokumen	10.000.000		1 Dokumen	15.000.000
06	01	02.2	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Progres Realisasi Anggaran		ASN	Kab. Kep. Selayar	1 Dokumen			1 Dokumen	10.000.000
06	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah dengan baik				10.000.000			45.000.000
06	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan barang milik daerah SKPD	Jumlah Dokumen yang dihasilkan	ASN	Kab. Kep. Selayar	1 Dokumen			1 Dokumen	15.000.000
06	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen yang dihasilkan	ASN	Kab. Kep. Selayar	1 Dokumen	10.000.000		1 Dokumen	15.000.000
06	01	2.03	06	Penatausahaan barang milik daerah	Jumlah Dokumen yang dihasilkan	ASN	Kab. Kep. Selayar				1 Dokumen	15.000.000
06	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian				80.000.000			105.000.000
06	01	2.05	01	Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	Jumlah sarana dan prasarana pegawai yang disiapkan	ASN	Kab. Kep. Selayar	2 Unit	10.000.000		2 Unit	15.000.000
06	01	2.05	02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pegawai yang memperoleh pakaian dinas dan kelengkapan lainnya	ASN	Kab. Kep. Selayar	25 ASN	10.000.000		25 ASN	20.000.000
06	01	2.05	04	Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	Jumlah Dokumen yang dihasilkan	ASN	Kab. Kep. Selayar	1 Dokumen	10.000.000		1 Dokumen	10.000.000
06	01	2.05	09	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah ASN Yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	ASN	Kab. Kep. Selayar	6 ASN	50.000.000		5 ASN	60.000.000
06	01	2.06		Admintrasi umum perangkat daerah	Terlaksananya administrasi umum dengan baik				335.000.000			505.000.000

06	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terlaksananya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	ASN	Kab. Kep. Selayar	1 Tahun	300.000.000	1 Tahun	350.000.000
06	01	2.06	04	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	ASN	Kab. Kep. Selayar	12 Bulan	10.000.000	12 Bulan	15.000.000
06	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	ASN	Kab. Kep. Selayar	12 Bulan	15.000.000	12 Bulan	30.000.000
06	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya jasa perizinan kendaraan Dinas/Operasional	ASN	Kab. Kep. Selayar	1 Tahun	10.000.000	1 Tahun	110.000.000
06	01	2.07		Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah					160.000.000		700.000.000
06	01	2.07	06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang diadakan	ASN	Kab. Kep. Selayar	9 Unit	110.000.000	9 Unit	200.000.000
06	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Perlengkapan kantor yang diadakan	ASN	Kab. Kep. Selayar	11 Unit	25.000.000	11 Unit	50.000.000
06	01	2.07	09	Pengadaan gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung yang di bangun	ASN	Kab. Kep. Selayar		0		400.000.000
06	01	2.07	11	Pengadaan Saran dan Prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana rumah singgah	ASN	Kab. Kep. Selayar	3 Set	25.000.000	3 Set	50.000.000
06	01	2.08		Peyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					580.046.737		555.000.000
06	01	2.08	01	Peyediaan jasa surat meyrurat	Tersedianya jasa surat menyurat	ASN	Kab. Kep. Selayar	12 Bulan	5.000.000	12 Bulan	5.000.000
06	01	2.08	02	Peyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Tersedianya Peyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	ASN	Kab. Kep. Selayar	12 Bulan	100.000.000	12 Bulan	100.000.000
06	01	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	ASN	Kab. Kep. Selayar	12 Bulan	475.046.737	12 Bulan	450.000.000
06	01	2.09		Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah					340.000.000		375.000.000
06	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi (LK3)	ASN	Kab. Kep. Selayar	2 Unit	200.000.000	2 Unit	100.000.000

06	01	2.09	02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, paja, dan perizinan kendaraan dinas operasionalatau lapangan	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas (Operasional)	ASN	Kab. Kep. Selayar	1 Tahun	120.000.000	1 Tahun	150.000.000
06	01	2.09	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	ASN	Kab. Kep. Selayar	57 Unit	10.000.000	57 Unit	50.000.000
06	01	2.09	07	Pemeliharaan aset tetap lainnya	Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	ASN	Kab. Kep. Selayar	57 Unit	10.000.000	57 Unit	50.000.000
06	01	2.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset tak berwujud yang dipelihara		Kab. Kep. Selayar	1 Web		1 Web	25.000.000
06	2			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					705.000.000		500.000.000
06	02	2.01		Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Terlaksananya Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)				500.000.000		170.000.000
06	02	2.01	01	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Jumlah Masyarakat KAT yang difasilitasi Permakanan	Masyarakat KAT	Kab. Kep. Selayar	26 KK			215.000.000
06	02	2.01	02	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Tersedianya Dokumen Study Kelayakan Lokasi KAT	Masyarakat KAT	Kab. Kep. Selayar	1 Paket	500.000.000	1 Paket	1.440.000.000
06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota				205.000.000		330.000.000
06	02	2.03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang Meningkatkan Kemampuannya	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	Kab. Kep. Selayar	20 Orang	25.000.000	20 Orang	30.000.000
06	02	2.03	02	Peningkatan Kemampuan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Yng meningkatkan kemampuannya	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	Kab. Kep. Selayar	11 Orang	50.000.000	11 Orang	60.000.000
06	02	2.03	03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kab/Kota	Jumlah PSKS Keluarga yang Meningkatkan Kemampuannya	PSKS Keluarga yang Meningkatkan Kemampuannya	Kab. Kep. Selayar	5 Orang	50.000.000	5 Orang	60.000.000
06	02	2.03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kab/Kota	Jumlah PSKS Lembaga (Karang Taruna) yang Meningkatkan Kemampuannya	PSKS Lembaga (Karang Taruna)	Kab. Kep. Selayar	3 Karang Taruna	50.000.000	3 Karang Taruna	150.000.000

06	02	2.03	05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Klien LK3 yang Mendapatkan Pelayanan kesejahteraan keluarga	Klien LK3 yang Mendapatkan Pelayanan	Kab. Kep. Selayar	15 Orang	30.000.000	15 Orang	30.000.000
06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					6.025.000.000		18.187.500.000
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar Serta Gelandangan Pengemis di Luar Pantil Sosial.	Terlaksananya rehabilitasi sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar Serta Gelandangan Pengemis di Luar Pantil Sosial.				2.810.000.000		8.591.500.000
				Penyediaan Permakanan	Jumlah penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar serta Gelandangan pengemis yang memperoleh bantuan permakanan	Jumlah penyandang disabilitas, anak telantar, lanjut usia telantar dan gepeng yang diberi bantuan permakanan	Kab. Kep. Selayar	600 KPM	2.360.000.000	5241 Orang	5.241.000.000
				Penyediaan Sandang	Jumlah penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar serta Gelandangan pengemis yang memperoleh bantuan Sandang.	Jumlah penyandang disabilitas, anak telantar, lanjut usia telantar dan gepeng yang diberi bantuan sandang	Kab. Kep. Selayar	250 Orang	100.000.000	5241 Orang	2.620.500.000
				Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial yang diberi bantuan	Jumlah penyandang disabilitas, anak telantar, lanjut usia yang diberi bantuan alat bantu	Kab. Kep. Selayar	100 Orang	130.000.000	100 Orang	300.000.000
				Pemberian Pelayanan Reunifikasi dan Keluarga	Jumlah Keluarga yang di Reunifikasi	Pendamping PKH				1 Tahun	50.000.000
				Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Pendamping PKH yang Memberikan Bimbingan/ Pendampingan		Kab. Kep. Selayar	30 Orang	100.000.000	30 Orang	150.000.000

06	04	04	2.01	07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak	Penunjang Operasional Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan kartu identitas Anak	PMKS	Kab. Kep. Selayar				1 Tahun	20.000.000
06	04	04	2.01	08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan Dan Kesehatan Dasar	Penunjang operasional pemberian Akses Layanan Pendidikan Dan Kesehatan Dasar.	PMKS	Kab. Kep. Selayar				1 Tahun	20.000.000
06	04	04	2.01	09	Pemberian Layanan Data Dan Pengaduan	Penunjang Operasional Pemberian Layanan Data Dan Pengaduan.	PMKS	Kab. Kep. Selayar				1 Tahun	20.000.000
06	04	04	2.01	10	Pemberian Layanan Kedaruratan		PMKS	Kab. Kep. Selayar	1 Tahun	50.000.000		1 Tahun	50.000.000
06	04	04	2.01	11	Pemberian pelayanan Penelusuran Keluarga		PMKS	Kab. Kep. Selayar				1 Tahun	20.000.000
06	04	04	2.01	12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Dalam Gangguan Jiwa Yang Tertangani	PMKS	Kab. Kep. Selayar	10 Orang	70.000.000		10 Orang	100.000.000
06	04	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar Panti Sosial	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar Panti Sosial	PMKS	Kab. Kep. Selayar		3.215.000.000			9.596.000.000
06	04	04	2.02	01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Penerima BPNT/Sembako yang di pantau dan diawasi penyalurannya	Penerima BPNT/Sembako	Kab. Kep. Selayar	12597 KPM	100.000.000		12597 KPM	216.000.000
06	04	04	2.02	03	Penyediaan Permakanan	Jumlah Masyarakat Miskin yang memperoleh bantuan permakanan	Masyarakat Miskin	Kab. Kep. Selayar	1000 KK	600.000.000		1800 KK	1.420.000.000
06	04	04	2.02	04	Penyediaan Sandang	Jumlah masyarakat Miskin yang memperoleh bantuan sandang	Masyarakat Miskin	Kab. Kep. Selayar				1 Tahun	20.000.000
06	04	04	2.02	05	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah PMKS yang menerima bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	PMKS (POKIR)	Kab. Kep. Selayar		375.000.000		300 KK dan 7 Kelompok	2.800.000.000
06	04	04	2.02	12	Pemberian Pelayanan dan Reunifikais Keluarga	Jumlah Keluarga/ahli waris pahlawan yang mendapatkan penghargaan	Keluarga/ahli waris pahlawan	Kab. Kep. Selayar	27 KK	70.000.000		27 KK	75.000.000

06	04	2.02	13	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Masyarakat Miskin yang memperoleh bantuan Perbaikan Rumah	Penerima bantuan RTLH	Kab. Kep. Selayar	300 KK	2.000.000.000	300 KK	4.825.000.000
06	04	2.02	02	Pemberian Layanan Kedaruratan	Penunjang operasional Pemberian Layanan Kedaruratan	PMKS	Kab. Kep. Selayar	1 Tahun			10.000.000
06	04	2.02	06	Penyediaan perbekalan kesehatan di luar panti	Penunjang operasional perbekalan kesehatan di luar panti	PMKS	Kab. Kep. Selayar	1 Tahun			20.000.000
06	04	2.02	07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Penunjang operasional Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	PMKS	Kab. Kep. Selayar	1 Kali			50.000.000
06	04	2.02	08	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya buksn korban HIV/Aids dan NAPZA	Terlaksananya Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya buksn korban HIV/Aids dan NAPZA	PMKS	Kab. Kep. Selayar	1 Tahun			70.000.000
06	04	2.02	09	Fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas anak	penunjang operasiona Fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas anak	PMKS	Kab. Kep. Selayar	1 Tahun			20.000.000
06	04	2.02	10	Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Terwujudnya pelayanan pada SLRT	PMKS	Kab. Kep. Selayar	1 Tahun	70.000.000		50.000.000
06	04	2.02	11	Pemberian pelayanan penulsuran keluarga	Penunjang opeasional Pemberian pelayanan penulsuran keluarga	PMKS	Kab. Kep. Selayar	1 Tahun			20.000.000
06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL					260.000.000		4.305.000.000
06	05	2.01		Pemeliharaan Anak Terlantar	Terlaksananya Pmeliharaan Anak Terlantar				110.000.000		130.000.000
06	05	2.01	01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar Yang Berhasil Di Jangkau	Anak Terlantar	Kab. Kep. Selayar	50 Orang	30.000.000		30.000.000
06	05	2.01	02	Rujukan Anak- Anak Terlantar	Jumlah anak terlantar Yang Mendapatkan Bantuan	Anak Terlantar	Kab. Kep. Selayar	30 Orang	80.000.000		80.000.000
06	05	2.01	03	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Penunjang Operasional Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Anak Terlantar	Anak Terlantar	Kab. Kep. Selayar	1 Tahun			20.000.000

06	05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terkasannya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				150.000.000			4.175.000.000
06	05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terkasannya Pengelolaan Data Fakir Miskin Dengan Aplikasi Siks-Ng Dan SIRT Serta web Dinas Sosial			Kab. Kep. Selayar	150.000.000	2 Aplikasi dan 1Web		175.000.000
06	05	2.02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Lanjut Usia Terlantar, Penjudang Disabilitas Dan Anak Yatim Piatu Yang Mendapatkan Bantuan Tunjangan Hidup			Kab. Kep. Selayar			1000 KK	3.850.000.000
06	05	2.02	04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Korban Bencana Yang Mendapatkan Bantuan Ekonomi			Kab. Kep. Selayar			30 Orang	150.000.000
06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA					300.000.000			1.510.000.000
06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Dan Sosial Kabupaten/ Kota	Terkasannya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Dan Sosial Kabupaten/ Kota				200.000.000			1.160.000.000
06	06	2.01	01	Penyediaan Makanan	Jumlah Korban Bencana Yang mendapatkan Bantuan Permakanan			Kab. Kep. Selayar	100.000.000	200 KK Korban Bencana		260.000.000
			02	Penyediaan Sandang	Jumlah Korban Bencana Yang Mendapatkan Bantuan Sandang			Kab. Kep. Selayar	50.000.000	100 KK		250.000.000
			03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Korban Bencana/Orang Terlantar Yang Ditampung			Kab. Kep. Selayar	50.000.000	100 KK		350.000.000
			04	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Jumlah Keluarga Rentan Yang Mendapatkan Bantuan			Kab. Kep. Selayar			35 Orang	150.000.000
			05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban bencana yang mendapatkan dukungan psikososial			Kab. Kep. Selayar			100 KK	150.000.000

06	06	2.02	Peyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota	Terlaksananya Peyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota			100.000.000			350.000.000
06	06	2.02	01 Koordinasi, Sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana	Jumlah anggota Taruna Siaga Bencana (TAGANA) yang mendapatkan tali asih	Kab. Kep. Selayar	100%	100.000.000	100%		200.000.000
06	06	2.02	02 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Penunjang operasional Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Kab. Kep. Selayar				6 Kec	150.000.000
6	07		PROGRAM PENGELOLAAN TAMA MAKAN PAHLAWAN				20.000.000			30.000.000
06	07	2.01	Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota	Terlaksananya Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota			20.000.000			30.000.000
06	07	2.01	01 Rehabilitasi sarana dan prasarana taman pahlawan nasional kabupaten/kota	Rehab Pagar TMP	Kab. Kep. Selayar					
06	07	2.01	02 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Pemeliharaan TMP dan Pelaksanaan Hari Pahlawan	Kab. Kep. Selayar	1 Tahun	20.000.000	1 Tahun	1 Tahun	30.000.000

Benteng, 1 Mei 2021

